

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Selasa 1 Oktober 2024
Wilayah	Kota Makassar



Triwulan III, Pemkot Makassar Serap Anggaran Rp2,4 Triliun

Triwulan III, Pemkot Makassar Serap Anggaran Rp2,4 Triliun

■ Realisasi Belanja Daerah Masih di Bawah 50 Persen

MAKASSAR, UPEKS—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membukukan serapan anggaran sebesar Rp2,4 triliun hingga triwulan III 2024.

Capaian tersebut masih rendah karena realisasi belanja daerah yang masih di bawah 50 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, realisasi serapan anggaran Pemkot Makassar baru mencapai 42,2 persen dari total anggaran sebanyak Rp5,7 triliun.

Realisasi tersebut berasal dari belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal dan belan-

ja lainnya. Dimana, belanja pegawai dengan realisasi tertinggi dengan capaian serapan 63 persen atau Rp1,05 triliun dari total anggaran Rp1,67 triliun.

Sementara realisasi lainnya dengan rincian belanja barang dan jasa terserap 47,5 persen atau Rp979,7 miliar dari target Rp2,06 triliun, belanja modal 12,2 persen atau Rp209,7 miliar dari Rp1,7 triliun dan belanja lainnya dengan capaian Rp192,3 miliar dari Rp323,08 miliar atau 59,5 persen.

Realisasi serapan anggaran menjadi perhatian serius dari Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis. Arwin menekankan optimalisasi pelayanan publik melalui evaluasi serapan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satunya realisasi belanja pegawai dengan melakukan percepatan pencairan gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait serapan anggaran. Ia menegaskan dirinya berkomitmen untuk meng-

optimalkan serapan anggaran dalam dua bulan masa jabatannya.

"Saya ingin selama dua bulan ini, serapan anggaran bisa maksimal, karena keberhasilan perangkat daerah salah satunya dinilai dari tingginya serapan anggaran yang mencerminkan banyaknya program yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat," kata Arwin.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, jika APBD tidak terserap dengan baik, hal itu menandakan pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat belum optimal.

Karena itu, Arwin menegaskan pekan depan dirinya berencana melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD. Evaluasi ini akan meliputi presentasi tentang persentase serapan anggaran yang telah dicapai hingga akhir triwulan ketiga.

"Saya ingin melihat, di akhir triwulan ketiga, jika serapan anggaran di bawah 50 persen, saya akan menanyakan kendalanya. Karena tidak masuk akal jika sudah memasuki triwulan ketiga tapi serapan masih di bawah 50 persen. Minimal harus mencapai 65-70 persen," tegasnya. (rul/hms)